

# **Strategi Suku Kurdi Irak dalam Membentuk Pemerintahan Kurdistan Regional Government (KRG) Tahun 2005-2009**

**Ashfar Tito Dauli**

*Hubungan Internasional Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang strategi suku Kurdi Irak dalam membentuk pemerintahan KRG dan menjaga keberlangsungannya. Suku Kurdi merupakan suku yang memiliki sejarah penindasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Suku Kurdi di Irak melakukan berbagai macam upaya untuk setidaknya mendapatkan otonominya. Cara-cara kekerasan telah ditempuh oleh suku Kurdi akan tetapi pemerintah Irak lebih kuat dari suku Kurdi. Penindasan terhadap suku Kurdi memuncak ketika terjadinya genosida dan ethnic cleansing. Sehingga suku Kurdi mulai mendapatkan perlindungan dari komunitas internasional. Suku Kurdi telah menikmati otonomi yang diraihinya secara sepihak. Pada tahun 2005, secara resmi pemerintahan suku Kurdi, KRG, diakui oleh pemerintah Irak. Demi menjaga keberlangsungan KRG, suku Kurdi menyadari bahwa perlunya untuk melakukan konsolidasi politik dan ekonomi internal. Serta perlunya suku Kurdi untuk melakukan paradiplomasi untuk menjalin kerjasama dengan aktor-aktor lain di tingkat internasional. Peneliti menetapkan jangkauan penelitian dari tahun 2005 sampai tahun 2009.*

**Kata-kata Kunci:** *Suku Kurdi, Irak, KRG, otonomi, neoliberalisme, paradiplomasi.*

*This research examined strategy of Iraqi Kurds on forming its own regional government, KRG, and how to maintain it. Kurds have a long history of oppression and suffering especially that is caused by its central government. Iraqi Kurds in achieving their goal, that is autonomy, have done various efforts and means. Iraqi Kurds have done even violence in achieving their goal. To contain the Kurds, the Iraqi government was willing to commit genocide and ethnic cleansing against the Kurds. The long oppression committed by the Iraqi government was noticed by the international community. Protection for the Kurds was granted and they have been enjoying their autonomy ever since. Since the fall of Saddam Hussein, in 2005, KRG has officially recognized as an autonomy government by Iraq through their new constitution. In order to maintain KRG, Iraqi Kurds feels the need to internally consolidate politically and forming their own economic strategy. KRG also needs to participate in paradiplomacy to form cooperation with other international actors.*

**Keywords:** *Kurds, Iraq, KRG, autonomy, neoliberalism, paradiplomacy.*

## Pendahuluan

Di tengah instabilitas politik dan konflik yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah terdapat etnis yang memperjuangkan untuk mendapatkan keadilannya yaitu etnis Kurdi. Menurut Torelli, keberadaan dan kepentingannya yang diabaikan menjadikan etnis Kurdi sebagai salah satu *stateless nation* terbesar di dunia (Torelli 2016, 18). Etnis Kurdi tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional yang berujung pada kemerdekaan untuk mendirikan negara mereka sendiri. Etnis Kurdi awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Turki Ottoman. Dengan jatuhnya Kerajaan Ottoman pada saat Perang Dunia I, etnis Kurdi dipisahkan di antara empat negara yaitu Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Secara geografis teritori dari etnis Kurdi tetap terhubung akan tetapi secara politik mereka terpisahkan oleh batas artifisial empat negara tersebut. Etnis Kurdi merupakan etnis yang tua di Timur Tengah. Kalender Kurdi dimulai pada tahun 612 sebelum masehi. Sehingga kalender Kurdi enam ratus tahun lebih tua dari pada kalender Gregorian dan seribu tahun lebih tua dari pada kalender Islam. Etnis Kurdi memiliki bahasa, budaya, dan bahkan hari rayanya sendiri yaitu Nowruz. Saat ini sebagian besar dari Kurdi memeluk agama Islam Sunni. Sebagian Kurdi lainnya memiliki beragam kepercayaan dan agamanya masing masing. Meskipun dengan beragam perbedaan agama dan kepercayaan, etnis Kurdi disatukan dengan budaya dan bahasa (bbc.com).

Sejarah dari suku Kurdi tidak dapat dilepaskan dari penindasan. Penindasan ini berupa penolakan terhadap identitas Kurdi, transfer populasi, penekanan etnis Kurdi, de-Kurdifikasi, dan bahkan *ethnic cleansing*. Pemerintah Irak melakukan tekanan terhadap etnis Kurdi karena adanya tuduhan bahwa Kurdi membantu Iran dalam perang (Bengio 2017, 11). Salah satu contoh bentuk penindasan tersebut terjadi pada masa Perang Irak-Iran (1980-1988). Pemerintah Irak menggunakan senjata kimia dalam kampanye militernya untuk menyerang etnis Kurdi. Serangan dengan menggunakan senjata kimia digunakan di kota Halabja dan juga digunakan saat kampanye militer Anfal. Menurut Bengio serangan ini mengakibatkan hilangnya nyawa sekitar 5.000 jiwa dan 180.000 etnis Kurdi; dan menghancurkan 4.500 desa.

Penindasan yang terus berlangsung mendapatkan perhatian dari komunitas internasional sehingga diterapkannya *no-fly zone* di wilayah bagian utara Irak sehingga terbentuklah *safe haven* yang secara efektif memberikan Kurdi Irak kontrol *de facto* atas wilayah tersebut (Hadji 2015, 519). Pada tahun 1992, Kurdi Irak menyelenggarakan pemilihan umum parlementer dan melahirkan Kurdistan Regional Parliament (KRP). Pemilihan umum tersebut diakhiri dengan hasil seri antara Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Setelah terbentuknya badan parlemen, dari pada mendeklarasikan kemerdekaan, para pemimpin suku Kurdi Irak memiliki visi untuk mendirikan sebuah entitas otonomi dalam wilayah Kurdistan yang tetap termasuk dalam pemerintahan Irak. Suku Kurdi berharap pemerintah Irak akan memberikan mereka otonomi penuh terhadap wilayahnya. Terjadinya pemilihan umum di wilayah Kurdistan Irak membuat marah pemerintahan Irak, Iran, dan Turki karena adanya kecurigaan bahwa suku Kurdi akan memisahkan diri dari Irak yang dapat membahayakan stabilitas wilayah. Amerika dan Turki memberi tekanan terhadap para pemimpin Kurdi untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Pemimpin Kurdi Irak setuju untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan tetapi memiliki tujuan untuk mendapatkan otonomi dalam wilayah Irak yang demokratis dan federal.

Pada tahun 2003, invasi Amerika Serikat ke Irak menghasilkan jatuhnya kekuasaan Saddam Hussein. Kurdi Irak berkontribusi dengan menurunkan pasukannya untuk membantu tentara Amerika Serikat. Jatuhnya Saddam Hussein dari kekuasaan menyebabkan Kurdi untuk mendapatkan otonomi yang lebih dan lepas dari tekanan sang diktator. Pada tahun 2005, pemerintah Irak memberikan status otonomi khusus untuk wilayah Kurdi Irak. Pemberian

status tersebut tertera dalam Konstitusi Irak tahun 2005. Selain pemberian otonomi khusus di wilayah Kurdistan, Konstitusi tersebut juga menjadikan Bahasa Kurdi sebagai salah satu bahasa resmi di Irak (washingtonpost.com). KRG (Kurdistan Regional Government of Iraq) memiliki ciri yang sama seperti negara yang telah merdeka (Bengio 2017, 13). KRG yang menetapkan Erbil sebagai ibu kotanya juga memiliki lagu kebangsaan dan hari nasionalnya sendiri. KRG memiliki jumlah populasi sebanyak enam juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 74 ribu km<sup>2</sup>. Luas ini juga mencakup keseluruhan atau sebagian dari Provinsi Duhok, Sulaymaniyah, Erbil, Kirkuk, Diyala dan Nineveh. Kawasan ini pula memiliki kandungan hidrokarbon dan air yang melimpah. Selain itu, posisi Kurdi Irak tersebut berada dalam interseksi Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia, Turki, Irak dan Iran. Kawasan ini juga menjadi titik pertemuan pusat dari empat peradaban dataran tinggi Iran, Anatolia dan Kaukasus yang merupakan rute transit diantara benua Asia, Afrika dan Eropa.

Kurdi Irak memiliki pemerintahannya sendiri, badan legislatif, pemilihan umum yang berbeda dengan pemerintah Irak. Sejak 2005, Kurdi Irak telah mengadakan pemilihan umumnya sendiri yang dimenangkan oleh Massoud Barzani dari KDP dan Jalal Talabani dari PUK menjadi presiden Irak dari tahun 2005 sampai 2014. Dibandingkan dengan warga Irak lainnya, Kurdi Irak memiliki standar hidup yang lebih tinggi, masuknya investasi asing, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi (Hadji 2015, 520). KRG juga memiliki pasukan militernya sendiri yaitu Peshmerga yang awalnya merupakan pasukan gerilya. Peshmerga merupakan alasan utama mengapa KRG lebih aman dan stabil dibandingkan dengan wilayah Irak lainnya. Keamanan kawasan KRG merupakan pondasi dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Jude 2017, 853). Dengan kondisi domestik yang dipenuhi dengan konflik di Irak, KRG merupakan bagian negara yang tetap stabil. Walaupun belum berhasil dalam mendirikan negara yang berdaulat, KRG dapat dikatakan berhasil dalam membentuk sistem pemerintahan. KRG telah berhasil dalam memberikan keamanan, membangun ulang infrastruktur, dan memelihara perkembangan ekonominya.

Sejak meraih otonomi KRG membangun nasionalisme Kurdi melalui sistem edukasinya. Sistem edukasi yang dimiliki oleh KRG berbeda dengan sistem dan kurikulum yang dimiliki oleh Irak. Dalam sistem pendidikan yang baru, semua buku pelajaran menggunakan bahasa Kurdi. Berbeda dengan generasi yang lama dimana semua buku pelajaran menggunakan bahasa Arab. Sehingga para pemuda Kurdi tidak lagi mengetahui atau belajar bahasa Arab. Buku pelajaran dalam sistem pendidikan baru menekankan pada Kurdistan, masyarakat, sejarah, dan budaya Kurdi. Sistem pendidikan baru tidak lagi mengajarkan tentang pengetahuan Irak atau Arab. Melalui buku pelajaran sejarah KRG menyampaikan pesan kepada generasi yang baru bahwa Kurdi adalah kelompok yang memiliki hak untuk *self-determination* dan memiliki negaranya sendiri.

KRG membuktikan bahwa mereka memiliki kapabilitas dalam *self-rule* dan mengembangkan kawasannya tersebut walaupun kondisi domestik Irak yang tidak stabil yang disebabkan oleh perang sipil antara komunitas Sunni dan Syiah. KRG juga ikut serta dalam mempromosikan kedamaian dan stabilitas di Irak dengan cara mengirimkan delegasi untuk memediasi konflik yang terjadi antara komunitas Sunni dan Syiah. KRG juga berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga Irak yang pada umumnya tidak setuju dengan ambisi dari suku Kurdi yaitu pembentukan negara Kurdistan. Demi untuk menjaga keberlangsungan ekonominya, KRG juga berupaya untuk dapat menarik investasi asing, pengusaha, misi diplomatik ke wilayah KRG (Ahmed 2012, 10).

## **Konsolidasi Politik dan Ekonomi Internal KRG dalam Penguatan Struktur Pemerintahan Otonom**

Rasa persatuan yang diperlihatkan oleh Kurdi pada saat pemilihan umum lama-lama memudar. Rasa kepercayaan dan transparansi menghilang antara KDP dan PUK. Hal ini berujung pada perang sipil. Pada tahun 1994 terjadi perang sipil antara KDP dan PUK yang berlangsung selama empat tahun. Perang sipil antar Kurdi Irak mengakibatkan pemerintahan Kurdi terbagi menjadi dua, yaitu KDP di Erbil dan PUK di Sulaymaniah. Konflik antara dua partai mengakibatkan peperangan, pembunuhan, dan mengakibatkan ribuan Kurdi kehilangan tempat tinggalnya (Ahmed 2012, 9). Perang sipil antara KDP dan PUK yang telah menghancurkan persatuan komunitas Kurdi akhirnya berakhir. Kedua partai menyadari bahwa suku Kurdi akan tidak akan mencapai tujuannya jika konflik diantara mereka tidak terselesaikan. Terutama ketika munculnya kesempatan yang telah dibuka oleh komunitas internasional yang memberikan mereka perlindungan terhadap mereka yang telah menjadi pondasi yang kemungkinan dapat membangun sebuah pemerintahan di wilayah Irak. Pada tahun 1998 perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kedua pihak yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Setelah perjanjian perdamaian disetujui KDP dan PUK tidak sepenuhnya bersatu. Kedua partai memiliki tempat kekuasaannya masing-masing. KDP mengambil kekuasaan di Erbil dan Duhok sedangkan PUK mengambil kekuasaan di Sulaymaniyah. Walaupun perang saudara berhenti, tetapi konflik-konflik kecil tetap terjadi antara dua partai tersebut.

KDP dan PUK menyadari bahwa untuk dapat mendapatkan suatu bentuk otonomi, keduanya harus mengesampingkan kepetingan masing-masing partai. Dengan bersatunya KDP dan PUK, suku Kurdi mendapatkan beberapa keuntungan dalam *Transitional Administrative Law* (TAL). TAL adalah undang-undang sementara yang berlaku sejak tahun 2004 dan mengatur Irak pada masa transisi hingga pada saat nanti pemerintahan yang demokrasi, permanen, dan memiliki konstitusi. Beberapa kemenangan yang dicapai adalah diakuinya Bahasa Kurdi sebagai salah satu dari dua bahasa resmi Irak dan menyetujui sistem pemerintahan yang federal dan demokratis. KRG yang meliputi Duhok, Erbil, dan Sulaimaniya akhirnya diakui, mempertahankan kontrol atas polisi dan pasukan militernya, dan menjadikan Peshmerga yang merupakan badan militer KDP dan PUK menjadi bagian dari pasukan militer Irak. Pengakuan dan pemberian otonomi atas KRG akhirnya secara resmi dikonfirmasi di dalam Konstitusi Irak tahun 2005.

Pada tahun 2005 setelah pemberian otonomi khusus terhadap KRG, disusunlah *Kurdistan Regional Government Unification Agreement*. Perjanjian tersebut akhirnya disetujui kedua partai pada tahun 2006. Adanya perjanjian tersebut diharapkan dapat menghentikan konflik yang terus berlangsung antara KDP dan PUK serta dapat menyatukan semua Kurdi di Irak. Perjanjian unifikasi menekankan pada pentingnya persatuan bagi setiap rakyat KRG untuk bersatu demi memajukan KRG dan Irak. Perjanjian unifikasi juga bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas KRG dan memperkuat posisinya di kawasan. Poin-poin lain dalam perjanjian unifikasi adalah bagaimana KDP dan PUK membagi posisi-posisi dalam pemerintahan KRG (cabinet.gov.krd). Perjanjian unifikasi adalah bentuk *power sharing* antara KDP dan PUK dalam jangka panjang. Dalam pidatonya Jalal Talabani, yang merupakan ketua partai PUK dan Presiden sementara Irak, berkata bahwa perjanjian unifikasi adalah refleksi dari keinginan dan aspirasi rakyat Kurdi dalam mencapai kesatuan, *rule of law*, dan legitimasi, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas individu. Talabani juga berkata bahwa adanya perjanjian tersebut akan berada di bawah kepetingan Irak karena menjadikannya sebagai jalan menuju demokrasi, kesatuan nasional, dan konsensus. Presiden KRG dan ketua partai KDP, Masoud Barzani, berkata bahwa reunifikasi tersebut bertujuan untuk menjaga kesatuan KRG

dan berharap administrasi yang dapat membentuk institusi yang mempromosikan transparansi, keadilan, menghargai hak individu, dan menghindari dari kekerasan (Ahmed 2012, 13).

Reunifikasi KDP dan PUK melahirkan strategi perkembangan KRG tersebut. Prioritas lain KRG demi mengembangkan perekonomiannya adalah dengan cara menarik investasi asing. Dengan berbagai studi yang dilakukan oleh KRG, mereka menyimpulkan bahwa perlunya undang-undang untuk mengaturnya. Undang-undang tersebut juga muncul untuk mendorong sektor privat. Maka dari itu pada tahun 2006 lahirlah KRG *Investment Law* yang diratifikasi oleh Presiden KRG, Masoud Barzani. KRG juga membuat badan institusi yang berguna untuk mengawasi perkembangannya dan lahirlah pula Kurdistan Board of Investment (BOI) yang dikepalai oleh Herish Muharam. BOI juga memiliki misi untuk membentuk kesempatan-kesempatan dalam perekonomian, menyediakan jasa yang profesional terharap para investor, dan bekerja untuk membangun keseluruhan Irak melalui wilayah Kurdistan ([investingroup.org](http://investingroup.org)).

KRG *Investment Law* dibuat demi menarik investasi-investasi lokal maupun asing. Kebijakan tersebut juga merupakan alasan utama mengapa KRG dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam waktu yang singkat. KRG *Investment Law* menarik bagi investor asing karena dianggap sebagai kebijakan yang paling ramah di Timur Tengah ([cabinet.gov.krd](http://cabinet.gov.krd)). Berikut adalah alasan mengapa kebijakan tersebut adalah kebijakan paling ramah di kawasan. Pertama, investor asing dan lokal diperlakukan secara sama di bawah undang-undang tersebut. Kedua, investor asing dan lokal memiliki hak untuk membeli atau memiliki tanah demi kepentingan investasi. Ketiga, pemerintah akan memberikan dengan cuma-cuma atau potongan harga dalam pembelian tanah untuk proyek jika memenuhi kriteria tertentu. Keempat, investor asing dapat membawa pulang semua keuntungannya.

Selain kebijakan investasi yang ramah untuk para investor asing, Peshmarga menjadi alasan lain mengapa perekonomian KRG dapat tumbuh dengan cepat. Peshmarga yang merupakan angkatan bersenjata milik KRG memberikan rasa aman bagi penduduk lokal, investor asing, turis, dan diplomat dibandingkan dengan bagian lain Irak (Ahmed 2012, 67). Perdana Menteri (PM) KRG, Nechirvan Barzani terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan melakukan kerjasama dengan Turki. Nechirvan Barzani merasa Turki sebagai aktor penting bagi kemajuan KRG karena Turki merupakan pintu gerbang Eropa. Akan tetapi Turki dan Kurdi memiliki sejarah yang pahit karena Turki sendiri telah mendeklarasikan perang kepada partai Kurdi di Turki, yaitu Kurdistan Workers' Party (PKK). Walaupun Turki berkali-kali mengintimidasi dan memberikan ancaman perang, PM Barzani berharap Turki dapat bekerjasama dalam isu kepentingan bersama, terutama dalam bidang keamanan yang merupakan hal yang vital bagi pertumbuhan ekonomi KRG.

Minyak bumi merupakan kekayaan utama yang menjadi penopang perekonomian Irak, khususnya sejak invasi oleh Amerika pada tahun 2003. Irak termasuk kedalam dua belas negara produsen minyak terbesar di dunia dan empat besar negara dengan cadangan minyak terbesar (Gray 2012). Sayangnya pasca perang, produksi minyak bumi Irak mengalami penurunan baik yang bersumber dari wilayah Irak maupun otonomi Kurdi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keamanan domestik yang berdampak pada instabilitas politik. Keamanan menjadi faktor utama yang menentukan stabilnya pasokan dan proses distribusi minyak bumi mulai dari hulu hingga ke hilir.

Kegagalan Irak dalam menjaga stabilitas politiknya pasca perang sebagai akibat kegagalan Irak tidak dapat memenuhi syarat yang diminta AS dalam *status of force agreement* dengan jaminan pasukan AS tetap ada yang tinggal setelah 2011. Dengan hengkangnya AS dari negara tersebut,

maka kekacauan, baik sosial, ekonomi dan politik semakin menjadi karena ruang kosong yang ada. Investor dan perusahaan minyak yang sudah dan akan membuka investasi di Irak menghentikan niatannya karena tidak adanya jaminan keamanan. Produksi minyak pada akhirnya jatuh dan turut memengaruhi perekonomian Irak dan Kurdi. Hengkangnya para investor juga diperparah dengan tidak adanya *Comprehensive Hydrocarbons Law* hingga sampai pada tahun 2007, sehingga memunculkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai legalitas kontrak yang ditandatangani terkait dengan investasi di bidang energy (Gray 2012). Adanya celah legalitas kontrak mengenai investasi di bidang energi dikarenakan politisi Irak tidak memberikan jaminan keamanan serta status pembagian keuntungan bagi hasil dengan KRG melalui *Profit-Sharing Contract (PSC)*. Selain itu, berinvestasi di bidang hidrokarbon dengan pemerintah pusat Irak dianggap tidak menguntungkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dirilis oleh US Department of Commerce dalam Buku Panduan Berbisnis di Irak, yang menjelaskan bahwa investasi dengan pemerintah pusat Irak tidak menguntungkan karena pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai *unclear land transfer policy*, lemahnya koordinasi proyek infrastruktur, serta lemahnya pemerintahan daerah dalam mengatur dan memfasilitasi proyek investasi (Gray 2012).

Kekacauan dan lemahnya manajemen yang terjadi di Irak berbeda dengan yang terjadi di KRG. Sejak tahun 2005-2014, KRG mampu membentuk *good level of security* yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini juga didukung dengan kemampuan KRG untuk menarik minat para investor asing dengan mekanisme yang lebih terjamin dalam implementasi rencana bisnis yang telah disepakati. Kemampuan KRG dalam membentuk struktur pemerintah otonom yang lebih maju dan mendapatkan banyak keuntungan inilah yang menyebabkan terjadinya gesekan dengan pemerintahan pusat Irak. Gesekan yang terjadi dengan pemerintahan pusat antara lain terkait dengan *power sharing*, produksi minyak dan kontrol territorial (Mils 2016).

### **Upaya Penguatan Kerjasama Internasional melalui Paradiplomasi KRG**

KRG memiliki otonomi penuh dalam wilayahnya sehingga dapat melakukan aktivitas pemerintahan secara mandiri. KRG juga secara mandiri melakukan hubungan luar negeri. Menurut Mohammed dan Owtram aktivitas hubungan luar negeri KRG tidak melanggar kontitusi dan tidak mengurangi kedaulatan Irak (Mohammed dan Owtram 2014, 69). Deputy Prime Minister Kurdistan Regional Government, Azad Barwari (2015) menyatakan bahwa:

*“It is right that formulating foreign policy and diplomatic representations of Iraq are included within the exclusive authority of the Federal government, but according to the Article 121/4 in the Iraqi Constitution: offices for the regions and governorates shall be established in embassies and diplomatic missions, in order to follow cultural, social, and developmental affairs which means that the regions and governorates have the rights to establish offices in embassies and participate in diplomatic missions in order to follow cultural, social, and developmental affairs.”*

Pemicu utama dari masuknya Kurdi Irak ke dalam dunia internasional adalah ketika wilayah Kurdi mendapatkan perlindungan dari komunitas internasional. Demi mendapatkan pengakuan, legitimasi, dan dukungan internasional untuk wilayah otonominya, pemerintah KRG menggunakan kesempatan untuk menjelaskan penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Saddam Hussein. Dengan jatuhnya Saddam Hussein, Kurdi Irak telah mengambil wilayahnya kembali dan diberikan status otonomi khusus. Para politis KRG juga

menekankan pentingnya perlindungan komunitas internasional agar penindasan dan ketidakadilan terhadap Kurdi untuk tidak terjadi lagi (Ahmed 2012, 47). Aktivitas KRG dalam dunia internasional mulai semakin aktif ketika diimplementasikannya program United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 688 dan 986 yang memberikan 13 persen dari minyak KRG untuk bahan pangan di wilayah Kurdistan di Irak. Menurut Natali, NGO memiliki peran dalam pembangunan ulang dan menyediakan bantuan kemanusiaan ke KRG sehingga memberikan kesempatan untuk aktivitas internasional KRG (Sharif 2015, 43).

Peran yang telah dimainkan oleh KRG di dalam negeri menunjukkan bahwa KRG menginginkan perdamaian dan kesatuan Irak. KRG juga menginginkan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam tingkat internasional. Tujuan KRG dalam hubungan luar negerinya adalah untuk mendapatkan pengakuan secara politik, legitimasi masuknya investasi asing, dan mendapatkan kepercayaan diplomatik (Ahmed 2012, 48). Untuk meraih tujuan tersebut KRG melakukan menjalin hubungan dengan dunia luar untuk dapat menarik investor asing dan para pengusaha untuk mengembangkan sumber daya di KRG. Selain memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang melimpah, wilayah KRG juga dipenuhi oleh tanah yang subur dan cadangan air yang melimpah. Keamanan dan stabilitas yang telah dicapai memberikan tempat yang aman bagi pengunjung, menarik turis, dan anggota misi diplomatik.

KRG memiliki hak untuk memiliki perwakilan di semua konsulat dan kedutaan Irak. Sejak tahun 2005, KRG telah melakukan aktivitas hubungan luar negerinya. Aktivitas ini meliputi pertukaran perwakilan dan kunjungan atau misi dengan negara asing berpartisipasi dalam konferensi dan organisasi internasional dan mendirikan kementerian yang menangani urusan diplomasi. Dalam reunifikasi KRG 2006, pemerintahan KRG membentuk Department of Foreign Relations (DFR) yang dikepalai oleh Falah Mustafa Bakir.

DFR bekerja sebagai penyambung antara KRG dan dunia internasional. DFR juga melakukan pertemuan rutin dengan para konsul asing, perwakilan PBB, dan perwakilan dari organisasi internasional lain untuk memberikan informasi terbaru tentang keamanan, politik, dan ekonomi di wilayah KRG. DFR juga berpartisipasi dalam acara-acara internasional sehingga dunia luar lebih mengenal KRG. Pekerjaan lain DFR juga meliputi mengatur perwakilan bagi KRG di luar negeri, memfasilitasi masuknya perwakilan dari organisasi internasional dan negara lain, dan mengatur kunjungan perwakilan demi kepentingan ekonomi dan politik untuk masuk ke KRG (Ahmed 2012, 51). KRG merupakan aktor non-negara sehingga menggunakan negosiasi, strategi ekonomi, dan diplomasi sebagai alat demi mencapai kepentingannya. Melakukan perjanjian internasional dilihat sebagai salah satu cara bagi pemerintahan KRG untuk memperlihatkan kapasitas dan mencapai kepentingannya. Sejak tahun 2006, KRG telah melakukan perjanjian dengan beberapa negara meliputi Korea Selatan, Jerman, Perancis, UEA, Jordania, Qatar, Mesir, Lebanon, Iran, dan Turki. Selain negara asing, KRG juga telah melakukan perjanjian internasional dengan perusahaan multinasional dan organisasi internasional, seperti UNESCO. Perjanjian-perjanjian tersebut dalam bidang perdagangan, turisme, infrastruktur, edukasi, pertanian, transportasi, minyak, dan gas. Demi untuk menghindari konflik dengan pemerintahan Irak, dalam negosiasinya di perjanjian internasional menginginkan perwakilan dari Irak untuk menandatangani atas nama KRG. KRG juga telah menjadi tuan rumah dari kunjungan diplomatik dari beberapa negara. KRG memiliki memiliki kantor dan perwakilan di beberapa negara asing.

Menurut Keating ada tiga motivasi pendorong untuk aktor non-negara untuk melakukan hubungan luar negeri, antara lain ekonomi, budaya, dan politik (Ahmed 2012, 67). Tiga faktor pendorong tersebut diperlukan oleh perkembangan KRG dalam menjaga keberlangsungan pemerintahannya. Pertama, secara ekonomi KRG memerlukan hubungan luar negeri untuk

mendapatkan investasi, pasar untuk produk-produknya, teknologi demi modernisasi, dan mempromosikan wilayahnya sebagai tujuan wisata. KRG juga memerlukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan domestik maupun asing untuk dapat mengembangkan sektor perindustrian dan juga untuk memperkuat kompetisi pasar. Kedua, secara budaya KRG memiliki bahasa dan budayanya sendiri sehingga dapat memperkenalkannya di dalam tingkat internasional. Tujuan lain KRG juga meliputi bidang pendidikan. Selain itu suku Kurdi selama ini memiliki sentimen negatif yang berasal dari pemerintahan Saddam Hussein maupun negara-negara tetangganya sebagai kriminal, pencuri, dan penghasut perang. Dengan semakin dikenalnya budaya Kurdi diharapkan dapat menghapus sentimen negatif terhadap mereka dan juga mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Ketiga, secara politik KRG menginginkan untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari komunitas internasional.

### **Kesimpulan**

Dalam mencapai otonomi suku Kurdi melalui proses yang cukup panjang. Suku Kurdi menggunakan berbagai macam upaya untuk dapat setidaknya mencapai otonomi. Suku Kurdi menggunakan cara-cara kekerasan dan memberontak terhadap pemerintah Irak. Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, suku Kurdi berada dalam tekanan dan mengalami berbagai macam penindasan. Perlawanan yang dilakukan oleh suku Kurdi tidak cukup untuk memukul mundur pasukan pemerintah Irak dan hanya cukup untuk bertahan hidup. Di bawah pemerintahan Saddam Hussein pula merasakan genosida dan *ethnic cleansing* melalui cara *Arabisation*. Suku Kurdi kehilangan tempat tinggalnya dan harus melarikan diri dan mengungsi di perbatasan Turki dan Iran.

Kekejaman yang dialami oleh suku Kurdi akhirnya mendapatkan perhatian dari komunitas internasional. PBB kemudian melakukan intervensi dan mengimplementasikan *no-fly zone* di wilayah utara Irak yang merupakan tempat pemukiman suku Kurdi. Adanya intervensi tersebut menyebabkan pemerinthan Irak untuk menarik pasukannya. Sehingga pengaruh dari pemerintah Irak di bagian utara Irak menjadi melemah. Suku Kurdi melihat hal tersebut sebagai kesempatan. KDP dan PUK memutuskan untuk melakukan pemilihan umum dan menghasilkan badan pemerintahan KRG dan parlemen KRP. Peneliti menggunakan rencana otonomi untuk meneliti strategi suku Kurdi dalam membentuk pemerintahan KRG. Rencana otonomi merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kelompok minoritas yang ingin untuk mendapatkan pengakuan dan haknya. Rencana otonomi digunakan agar konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan kelompok minoritas tidak berujung kepada kekerasan. Suku Kurdi telah berulang kali mengajukan permohonan untuk mendapatkan otonomi akan tetapi pada masa pemerintahan Saddam Hussein, pemerintah pusat tidak ingin Kurdi untuk mendapatkan otonomi.

Pada tahun 2003, terbentuklah kelompok oposisi yang terdiri dari kelompok Arab, Amerika Serikat dan suku Kurdi. Suku Kurdi tidak secara langsung masuk ke dalam kelompok oposisi. Suku Kurdi ingin melihat situasi dan pihak mana yang akan lebih menguntungkan bagi suku Kurdi, pihak oposisi atau pemerintah. Suku Kurdi sekali lagi mengajukan permintaan untuk pemberian otonomi kepada pemerintahan Saddam Hussein akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Suku Kurdi juga menawarkan permintaan yang sama terhadap kelompok oposisi seperti hak untuk memiliki wilayah otonomi, pengakuan suku Kurdi, dan diakuiinya bahasa Kurdi. Rencana otonomi dapat digunakan dengan baik untuk menjawab rumusan masalah. Suku Kurdi melakukan negosiasi tentang rencana otonomi dengan pihak oposisi. Jatuhnya Saddam Hussein menjadi awal mula dari KRG sebagai badan pemerintahan otonomi.



Peneliti menggunakan neoliberalisme untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai bentuk pemerintahan yang baru KRG perlu untuk menyatukan tujuan secara internal. KDP dan PUK merupakan dua partai besar Kurdi akan tetapi diantara keduanya sering terjadi konflik. Ketidakpercayaan dan transparansi antara keduanya merupakan alasan utama gesekan sering terjadi. Demi untuk mencapai tujuan utama dari suku Kurdi kedua partai menyadari bahwa perlunya konsolidasi secara internal. Sehingga reunifikasi antara kedua partai dilakukan. Reunifikasi antara KDP dan PUK merupakan bentuk *power sharing* antara keduanya. Perjanjian unifikasi bertujuan untuk menjaga kesatuan KRG dan berharap dapat mempromosikan transparansi, keadilan, menghargai hak individu dan menghindari dari kekerasan. Perjanjian tersebut salah satunya menghasilkan pembagian jabatan dalam pemerintahan KRG. Hasil lain dari perjanjian unifikasi adalah terbentuknya strategi perkembangan ekonomi KRG. KRG berharap untuk dapat berkembangnya sektor privat dengan cara menjaga persaingannya. KRG melalui kebijakan investasinya menarik masuknya investasi-investasi dan perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan investasi KRG merupakan kebijakan yang ramah dan sangat menguntungkan investor. Salah satu alasannya adalah karena investor dapat menarik semua keuntungan secara penuh. KRG juga memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki daya tawar.

Peneliti menggunakan paradiplomasi menjelaskan strategi pembentukan pemerintahan KRG. Peneliti berpendapat bahwa dengan melakukan paradiplomasi KRG dapat berpartisipasi dalam tingkat internasional sehingga dapat menjalin kerjasama dengan negara lain demi pembangunan pemerintahannya. Secara kewenangan KRG sebagai memiliki hak untuk melakukan hubungan internasional akan tetapi tidak memiliki hak untuk membuat kebijakan. Semua persetujuan antara KRG dengan pihak eksternal hal disetujui atau ditandatangani oleh pihak pemerintah pusat. Dalam paradiplomasi, entitas otonom dapat berpartisipasi dalam tingkat internasional tergantung pada kesempatan dan kepentingannya. Kesempatan suku Kurdi untuk masuk dalam tingkat internasional adalah ketika terjadinya penindasan oleh pemerintahan Saddam Hussein. Mendapatkannya perhatian dari tingkat internasional merupakan kesempatan bagi suku Kurdi untuk membuat pernyataan bahwa suku Kurdi ada. Kepentingan KRG dalam hubungan luar negerinya adalah untuk mendapatkan pengakuan secara politik, legitimasi, dan masuknya investasi asing. Maka dari itu KRG melakukan hubungan luar negeri untuk dapat menarik para investor asing dan pengusaha untuk mengembangkan sumber daya yang ada di wilayah KRG.

## Daftar Pustaka

### Artikel

- “Trouble in Kurdistan”, *Andrew Lee Butters* [online], terdapat dalam <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1174457,00.html>. [diakses pada 2 Mei 2019].
- “History of Russian Consulate General in Erbil”, *Consulate General of the Russian Federation in Erbil* [online], terdapat dalam [https://rusgencons-erbil.mid.ru/en\\_GB/history](https://rusgencons-erbil.mid.ru/en_GB/history)
- “Soft Power”, *International Relations* [online] terdapat dalam <https://internationalrelations.org/soft-power/> [diakses pada 9 Mei 2019].
- “Long-term Collaboration, Dilshad Barzani Interview”, *Invest in Group* [online], terdapat dalam <https://investingroup.org/interview/150/dilshad-barzani-krp/> [diakses pada 12 Mei 2019].
- “Nation-States, Separatist Movements and Autonomy Arrangements: between War and Independence”, *Wade Stothart* [online] terdapat dalam

<http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/Stothart.pdf> [diakses pada 10 Juni 2019].

## **Berita**

“Determined to Grow: Economy, Kurdistan Region”, *Invest in Group* [online], <https://investingroup.org/review/236/determined-to-grow-economy-kurdistan/>. [diakses pada Mei 3 2019].

“What did Russia get from its KRG gamble?”, *Al Jazeera* [online], terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/features/russia-kr-gamble-rosneft-iraq-kurdistan-190409123038460.html> [diakses pada 8 Mei 2019].

“Who Are the Kurds?”, *BBC* [online], terdapat dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440>. [diakses pada 10 November 2017].

“Mustafa Barzani, Kurd’s Leader Dies”, *NY Times* [online], terdapat dalam <https://www.nytimes.com/1979/03/02/archives/mustafa-barzani-kurds-leader-dies-he-led-a-protracted-war-against.html> [diakses pada 8 Agustus 2018].

“Full Text of Iraqi Constitution”, *Washington Post* [online], terdapat dalam <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/12/AR2005101201450.html> [diakses pada 22 Februari 2018].

## **Buku**

Hannes Cerny, *Iraqi Kurdistan, the PKK and International Relations*, New York: Routledge, 2018.

Mohammed M. A. Ahmed, *Iraqi Kurds and Nation-Building*, New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Ofra Bengio, *The Kurds in a Volatile Middle East*, Ramat Gan: The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2017.

Stefano M. Torelli, *Kurdistan an Invisible Nation*, Milan: The Italian Institute for International Political Studies, 2016.

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian*, Bandung: Umpar Press, 2006.

## **Jurnal**

Alexander L. George, “Conflict Resolution in a Changing World”, dalam *International Conflict Resolution After the Cold War*, 2000.

Anthony Wanis-St. John, Suzanne Ghais, “International Conflict Resolution: from Practice to Knowledge and Back Again”, *The Handbook of Conflict Resolution*, 2014.

Dana Ali Salih, Bakhan Ako Najmalddin, “Paradiplomacy of the Kurdistan Region After 2003: Present and Future” dalam *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2016.

Erbal Soylemez, “An Analysis of Kurdistan Regional Government’s Economic Policy Between 2003-2013”, *Development Studies and Politics SOAS*, 2013.

Flick, Uwe, “Qualitative and Quantitative Research”, dalam *An Introduction to Qualitative Research*, London: SAGE, 2006.

Herish Khali Mohammed, Francis Owtram, “Paradiplomacy of Regional Government in International Relations: The Foreign Relations of the Kurdistan Regional Government (2003-2010)” dalam *Iran and the Caucasus* 18, 2014.

Johannes Jude, “Contesting borders? The Formation of Iraqi Kurdistan’s De Facto State” dalam *International Affairs* 93: 4, 2017.

Joseph S. Nye, “Soft Power”, dalam *Foreign Policy* no. 80, 1990.

- Phillip S. Hadji, "The Case for The Kurdish Statehood in Iraq", Case Western Reserve University School of Law, 2015.
- Sardar Mosa Sharif, "An Analysis of Kurdistan Region of Iraq Diplomacy and Foreign Policy Objectives 2003-2013", Duhok University, 2015.
- Seyed AA, Shahram F, "Kurdistan Privacy Government and Efforts to Riddance from Geopolitical Restrictions", Journal of Political Sciences & Public Affairs, 2017.

### **Jurnal Daring**

- Angus Okechukwu Unegbu, Augustine Okanlawon, "Direct Foreign Investment in Kurdistan Region of Middle-East: Non-Oil Sector Analysis" [daring], terdapat dalam <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.00218.pdf> [diakses pada 5 Mei 2019].
- Bill Park, "Turkey-Kurdish Regional Government Relations After the US Withdrawal from Iraq: Putting the Kurds on the Map?" [daring] terdapat dalam <https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/378166689.pdf> [diakses pada 5 Mei 2019].
- Chase Gray, "Petrocapitalism in Iraqi Kurdistan: Leveraging Oil and Gas Firms in Post-War Iraq" [daring], terdapat dalam [https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1343&context=cmc\\_theses](https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1343&context=cmc_theses).
- Dag Einar Thorsen, Amund Lie, "What is Neoliberalism" [daring] terdapat dalam <http://folk.uio.no/daget/neoliberalism.pdf> [diakses pada 8 Mei 2019].
- Harris Mylonas, Ariel I. Ahram, "De Facto States Unbound" [daring], terdapat dalam [https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/PONARS\\_374\\_Mylonas-Ahram\\_August2015\\_0.pdf](https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/PONARS_374_Mylonas-Ahram_August2015_0.pdf) [diakses pada 22 Februari 2018].
- Kawa Jabary, Anil Hira, "The Kurdish Mirage: a Success Story in Doubt" [daring], terdapat dalam [https://www.academia.edu/3855625/The\\_Kurdish\\_Mirage\\_A\\_Success\\_Story\\_in\\_Doubt](https://www.academia.edu/3855625/The_Kurdish_Mirage_A_Success_Story_in_Doubt) [diakses pada 5 Mei 2019].
- Merve Ozdemirkiran, "Soft Power and the Challenges of Private Actors: Turkey-Kurdish Regional Government (KRG) Relations and the Rising Role of Businessman in Turkish Foreign Policy", [daring] terdapat dalam <https://journals.openedition.org/ejts/5268#ftn2> [diakses pada 5 Mei 2019].
- Robin Mils, "Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics" [daring], terdapat dalam <https://www.oxfordenergy.org/publications/under-the-mountains-kurdish-oil-and-regional-politics/> [diakses pada 5 Mei 2019].
- Stefan Wolff, "Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges" [daring], terdapat dalam <http://www.saisjournal.org/posts/paradiplomacy>.

### **Buku Putih Pemerintahan**

- "Tourism", *KRG Board of Investment* [online] terdapat dalam <http://www.boi.gov.krd/tourism.html> [diakses pada 5 Mei 2019].
- "JICA Report", *KRG Ministry of Planning* [online], terdapat dalam <http://www.mop.gov.krd/resources/MoP%20Files/PDF%20Files/DCC/Reports/JICA%20Report%20-%20English.pdf> [diakses pada 8 Mei 2019].
- "Contributions of the Republic of South Korea to Kurdistan Region from 2004 to the End of 2010", *KRG Ministry of Planning* [online], terdapat dalam <http://www.mop.gov.krd/resources/MoP%20Files/PDF%20Files/DCC/Reports/Contributions%20of%20South%20Korea%20to%20Kurdistan%20Region.pdf>.

- “The KRG’s economic development strategy”, *Kurdistan Regional Governement* [online], terdapat dalam <http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=12&a=18617>. [diakses pada 3 Mei 2019].
- “Kurdistan’s investment law: The friendliest in the region”, *Kurdistan Regional Governemnt* [online], <http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=03010800&l=12&asnr=&a=18620&r=145&s=010000>. [diakses pada Mei 4 2019].
- “Kurdistan Regional Government Unification Agreement”, *Kurdistan Regional Government* [online], terdapat dalam <http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?r=223&l=12&a=8891&s=02010100&s=010000>. [diakses pada 2 Mei 2019].
- “Iraq: Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period”, *Law of Adminitration for the State of Iraq* [online] terdapat dalam <https://www.refworld.org/docid/45263d612.html> [diakses pada 2 Mei 2019].